

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah panjang dalam hal perekonomian. Sejak masa kolonial, Indonesia telah menjadi produsen utama rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan kayu manis yang menjadi komoditas perdagangan utama dengan Eropa. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam membangun perekonomiannya, termasuk krisis ekonomi yang berulang kali terjadi pada tahun 1960-an hingga 1990-an. Namun, pada tahun 2000-an, Indonesia berhasil memulihkan ekonominya dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun masih diwarnai dengan beberapa tantangan. Beberapa faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ;

- Pertumbuhan industri manufaktur dan jasa yang kuat, terutama di sektor pariwisata
- Investasi asing yang meningkat, terutama dari China dan Jepang.

Kebijakan ekonomi yang stabil dan reformasi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pengurangan defisit anggaran dan peningkatan pengeluaran infrastruktur. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup positif, masih terdapat beberapa tantangan dalam bidang keuangan, antara lain: Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketergantungan ekonomi pada beberapa komoditas seperti minyak dan gas, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global. Rendahnya inklusi keuangan di kalangan masyarakat, sehingga masih banyak orang yang belum memiliki akses ke layanan keuangan dasar seperti tabungan dan asuransi. Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, termasuk dengan meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan memperkuat sektor industri dan jasa.

1.1.1. Perkembangan Keuangan di Indonesia

Perkembangan keuangan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial-politik yang terjadi. Berikut ini beberapa perkembangan keuangan terkini di Indonesia:

1. Pertumbuhan sektor keuangan digital

Seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan perangkat mobil di Indonesia, sektor keuangan digital semakin berkembang. Banyak perusahaan fintech yang telah muncul dan menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan secara online, termasuk layanan pinjaman online, transfer uang digital, dan investasi saham online.

2. Peningkatan inklusi keuangan

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan mengembangkan sistem keuangan inklusif, seperti program pemerintah BRI-Link yang menawarkan layanan keuangan dasar di wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, bank-bank swasta dan lembaga keuangan lainnya juga telah memperluas jaringan kantor dan layanan di daerah-daerah yang belum terlayani.

3. Pertumbuhan sektor pasar modal

Pasar modal Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengalami kenaikan jumlah perusahaan yang *go-public* dan jumlah investor, serta adanya inisiatif untuk meningkatkan aksesibilitas pasar modal bagi investor kecil dan menengah.

4. Pengembangan infrastruktur keuangan

Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan investasi dalam infrastruktur keuangan, termasuk pengembangan infrastruktur jaringan pembayaran dan pemrosesan transaksi elektronik, serta memperkuat infrastruktur keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan infrastruktur jalan raya, pelabuhan, dan bandara.

Meskipun perkembangan keuangan di Indonesia sudah cukup positif, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perluasan akses keuangan dan perbaikan regulasi keuangan. Oleh karena itu, pemerintah dan industri keuangan di Indonesia harus terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sistem keuangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Program YESS (*Youth Entrepreneurship and Employment Support Services*) adalah program yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan pemuda tani dalam bekerja di sektor pertanian dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM)

di sektor pertanian di Indonesia. Program ini diluncurkan pada tahun 2019 oleh Kementerian Pertanian dan *International Fund for Agriculture Development* (IFAD).

Program YESS berfokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah di sektor pertanian, dengan memberikan pelatihan, dukungan teknis, serta akses ke pasar untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan di kalangan pemuda agar dapat berkontribusi pada pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

Program YESS memiliki beberapa kegiatan, di antaranya:

1. Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan: Program ini memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemuda yang ingin memulai usaha di sektor pertanian. Pelatihan meliputi keterampilan manajemen bisnis, pemasaran, dan pengembangan produk.
2. Pemberian modal usaha: Program ini memberikan modal usaha kepada pemuda yang ingin memulai usaha di sektor pertanian. Modal usaha diberikan dalam bentuk pinjaman dengan bunga rendah dan jangka waktu yang panjang.
3. Dukungan teknis: Program ini memberikan dukungan teknis kepada petani dan pemuda yang ingin memulai usaha di sektor pertanian. Dukungan teknis meliputi penyediaan bibit unggul, pupuk, obat-obatan, serta pelatihan tentang teknologi pertanian.
4. Akses ke pasar: Program ini membantu petani dan pemuda untuk mengakses pasar dan meningkatkan kualitas produk. Program ini juga membantu petani dan pemuda untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen melalui pasar online.

Program YESS diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di Indonesia, serta membantu pemuda untuk menjadi wirausahawan di sektor pertanian. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Adapun Anggaran tersebut Sebagai Berikut :

Tabel 1.1. Rencana Kerja Anggaran Satker Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun 2023

Nomor	Program/ Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Output/ Suboutput/ Komponen	Alokasi Anggaran T.A 2023	
		Volume	Jumlah
1	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	1 kegiatan	38,198,883,000
2	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	6469 Orang	1,329,800,000
3	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2000 Orang	3,444,400,000
4	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat [Base Line]	22 Kelompok Masyarakat	1,020,000,000
5	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan [Base Line]	1419 Orang	27,321,105,000

Sumber : Polbangtan Bogor, 2023

Guna memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran Polbangtan Bogor dan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **judul Pengaruh Anggaran Yess dan Bantuan Luar Negeri Terhadap Anggaran Polbangtan Bogor.**

Bantuan luar negeri adalah pemindahan internasional berupa barang dan jasa dari sebuah negara atau organisasi internasional untuk kepentingan negara penerima ataupun penduduk negara penerima tersebut. Bantuan luar negeri dapat berbentuk pemindahan sumber daya, komoditas, nasehat teknis, dan pelatihan

Bantuan luar negeri seringkali menjadi instrumen untuk memperoleh kepentingan negara pendonor. Negara pendonor biasanya memberikan bantuan untuk menjaga keamanan dalam negerinya. Bantuan tersebut juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan diplomatik negara pendonor, mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional, atau untuk meningkatkan pengaruhnya di negara-negara penerima. Tujuan lain dari bantuan luar negeri adalah untuk mempromosikan komoditas ekspor melalui program-program, dan menyebarkan bahasa, budaya, serta agama negara pendonor.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Permasalahan anggaran bantuan luar negeri

Permasalahan anggaran bantuan luar negeri bisa mencakup beberapa aspek, di antaranya:

1. Penggunaan anggaran yang tidak efektif: Bantuan luar negeri dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan infrastruktur, pemberian bantuan

kemanusiaan, atau pendidikan. Namun, jika penggunaan anggaran tidak direncanakan dengan baik atau tidak diawasi dengan baik, maka anggaran tersebut mungkin tidak efektif dan tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

2. Tidak adanya transparansi: Bantuan luar negeri seringkali dikucurkan melalui organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut. Namun, jika tidak ada transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut, maka bisa terjadi penyalahgunaan atau korupsi.
3. Tidak adanya dukungan dari masyarakat: Bantuan luar negeri yang diterima oleh suatu negara seringkali dikritik oleh masyarakat setempat karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat atau dianggap sebagai bentuk campur tangan asing. Hal ini bisa menghambat pelaksanaan program bantuan tersebut dan membuatnya tidak efektif.
4. Tergantung pada bantuan: Jika suatu negara terlalu bergantung pada bantuan luar negeri, maka hal ini bisa menyebabkan ketergantungan ekonomi dan keuangan pada negara donor. Selain itu, jika bantuan tersebut tidak stabil atau dicabut, maka negara penerima bantuan bisa mengalami kesulitan dalam menjalankan program atau kegiatan yang bergantung pada bantuan tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan perencanaan dan pengawasan yang baik dalam penggunaan anggaran bantuan luar negeri agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan dan menghindari terjadinya permasalahan seperti yang disebutkan di atas. Selain itu, perlu juga dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan masyarakat setempat agar program bantuan tersebut dapat relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1.2.2 Permasalahan Anggaran YESS

Program YESS (*Youth Entrepreneurship and Employment Support Services*) Kementerian Pertanian adalah salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi generasi muda dan memperbaiki produktivitas pertanian di Indonesia. Namun, seperti program-program lainnya, program ini juga menghadapi beberapa permasalahan anggaran, di antaranya:

1. Kurangnya anggaran : Program YESS memerlukan anggaran yang cukup besar untuk menjalankan program-programnya, seperti pelatihan, pengembangan kapasitas, dan

pemberian dukungan keuangan untuk pengembangan usaha pertanian. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk program ini terkadang tidak mencukupi, sehingga program-program tersebut terkendala dalam pelaksanaannya.

2. Keterlambatan pencairan anggaran : Keterlambatan pencairan anggaran dari pihak yang bertanggung jawab bisa menghambat pelaksanaan program YESS, karena lembaga-lembaga atau organisasi yang menjadi mitra program tidak dapat mengeluarkan biaya operasional mereka. Hal ini bisa berdampak pada keberlangsungan program dan kualitas hasil yang dicapai.
3. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi : Program YESS melibatkan banyak lembaga dan pihak terkait, seperti Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi bisa membuat pelaksanaan program menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan.
4. Tidak adanya pengawasan yang efektif : Pengawasan dan evaluasi yang efektif sangat penting dalam program YESS untuk mengetahui apakah program sudah berjalan dengan baik atau masih perlu perbaikan. Tidak adanya pengawasan yang efektif bisa memungkinkan terjadinya penyimpangan, penyelewengan dana, atau ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.

Oleh karena itu, penting bagi Kementerian Pertanian dan mitra-mitra program YESS untuk melakukan perencanaan dan pengawasan yang baik terhadap penggunaan anggaran program. Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi antar instansi perlu ditingkatkan untuk memastikan program berjalan dengan baik. Terakhir, penting juga untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang efektif agar program YESS dapat memberikan dampak yang nyata bagi pengembangan sektor pertanian dan lapangan kerja di Indonesia.

1.2.3 Permasalahan Anggaran Polbangtan Bogor

Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor (Polbangtan Bogor) adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang fokus pada bidang pertanian dan peternakan. Namun, seperti halnya lembaga lainnya, Polbangtan Bogor juga menghadapi beberapa permasalahan anggaran, di antaranya:

1. Kurangnya anggaran operasional : Polbangtan Bogor membutuhkan anggaran operasional yang cukup besar untuk menjalankan aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, anggaran yang dialokasikan terkadang tidak mencukupi, sehingga lembaga ini terkendala dalam pelaksanaannya.
2. Keterlambatan pencairan anggaran : Keterlambatan pencairan anggaran dari pihak yang bertanggung jawab bisa menghambat pelaksanaan program di Polbangtan Bogor. Hal ini bisa berdampak pada keberlangsungan program dan kualitas hasil yang dicapai.
3. Kurangnya dukungan dari pihak swasta : Polbangtan Bogor juga menghadapi permasalahan dalam mendapatkan dukungan dari pihak swasta untuk pengembangan program-programnya. Kurangnya dukungan tersebut bisa membuat program-program di Polbangtan Bogor terhambat dalam pengembangannya.
4. Kurangnya koordinasi dan sinergi antarlembaga : Polbangtan Bogor adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi yang terkait dengan sektor pertanian dan peternakan. Kurangnya koordinasi dan sinergi antarlembaga bisa membuat pelaksanaan program di Polbangtan Bogor menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan.
5. Tidak adanya pengawasan yang efektif : Pengawasan dan evaluasi yang efektif sangat penting dalam Polbangtan Bogor untuk mengetahui apakah program sudah berjalan dengan baik atau masih perlu perbaikan. Tidak adanya pengawasan yang efektif bisa memungkinkan terjadinya penyimpangan, penyelewengan dana, atau ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.

Oleh karena itu, Polbangtan Bogor dan pihak yang terkait perlu melakukan perencanaan dan pengawasan yang baik terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, dukungan dari pihak swasta dan koordinasi dan sinergi antarlembaga perlu ditingkatkan untuk memastikan program berjalan dengan baik. Terakhir, penting juga untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang efektif agar Polbangtan Bogor dapat memberikan dampak yang nyata bagi pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Indonesia.

1.3. Perumusan Masalah

Hasil identifikasi masalah yang ada di Polbangtan Bogor menunjukkan bahwa permasalahan yang ada cukup banyak. Guna mencegah mengembangkannya penelitian, maka penulis membatasi masalah agar terperinci dan jelas. Harapannya pemecahan masalahnya

bisa lebih terarah. Oleh sebab itu penulis membatasi penelitian ini hanya pada Pengaruh Anggaran Program Yess dan Bantuan Luar Negeri Terhadap Anggaran Polbangtan Bogor.

1. Apakah secara parsial anggaran Yess berpengaruh terhadap anggaran Polbangtan Bogor ?
2. Apakah secara parsial bantuan luar negeri berpengaruh terhadap anggaran Polbangtan Bogor ?
3. Apakah secara simultan anggaran Yess dan bantuan luar negeri berpengaruh terhadap anggaran Polbangtan bogor ?

1.4. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apakah anggaran Yess berpengaruh signifikan terhadap anggaran Polbangtan Bogor
2. Untuk mengetahui apakah bantuan luar negeri berpengaruh signifikan terhadap anggaran Polbangtan Bogor
3. Untuk mengetahui apakah anggaran yess dan bantuan luar negeri berpengaruh signifikan terhadap anggaran Polbangtan Bogor

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai masukan oleh pegawai Polbangtan Bogor khususnya yang berhubungan dengan anggaran
2. Membantu pengembangan tentang anggaran yang ada di Polbangtan Bogor
3. Menambah wawasan bagi penulis di bidang anggaran keuangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut skripsi ini maka materi-materi skripsi dikelompokkan menjadi subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi, teknik penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang objek penelitian, hasil dan pembahasan yang lebih lengkap mengupas berbagai penjelasan yang ada dalam penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.